

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020: 16) metode penelitian kuantitatif didasarkan pada filsafat *positivisme*, dengan tujuan yaitu mempelajari suatu populasi atau sampel melalui instrumen penelitian guna mendapatkan data dan informasi yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dilakukan analisis statistik. Setelah ditentukannya suatu hipotesis, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis. Terdapat 3 ciri dari penelitian yang menggunakan pendekatan ini menurut (Nurwulandari dan Darwin, 2020). Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif memiliki sifat yang tetap sehingga judul dari penelitian ini tidak akan berubah. Selain itu terdapat perkembangan atas permasalahan yang sudah diteliti pada penelitian-penelitian sebelumnya. Serta apabila permasalahannya tidak sama dengan temuan di lapangan maka harus dikuatkan dengan fakta yang ditemukan selama melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan kolusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak dan gas di Bursa Efek Indonesia yang terdeteksi melakukan penghindaran pajak.

3.2 Penentuan Populasi dan sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi ialah wilayah yang sifatnya general dan terdiri atas obyek dan subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang selanjutnya akan dipelajari sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020: 126). Populasi pada penelitian ini yaitu termasuk perusahaan migas yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022 sebanyak 18 perusahaan migas.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari keseluruhan populasi yang dipilih secara selektif berdasarkan karakteristik tertentu (Ikhsan & Muhyarsyah, 2018). Purposive sampling digunakan untuk melakukan pemilihan sampel. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan penelitian, sehingga mencerminkan karakteristik yang diinginkan secara jelas dan lengkap (Rahmani, 2016). Kriteria yang dipakai untuk sampel penelitian ini yakni :

1. Perusahaan migas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Kriteria ini dipilih oleh peneliti berdasarkan pada fenomena latar belakang yang sudah diuraikan.
2. Perusahaan migas yang secara berkesinambungan menerbitkan dan menyampaikan laporan keuangan mereka di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2018-2022 dan mempunyai data lengkap sesuai yang diteliti.

Dari kriteria tersebut terpilih 14 perusahaan dari total 18 perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini dengan periode penelitian lima tahun, menghasilkan total 70 data penelitian.

Tabel 3.1 Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan migas yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022	18
2	Perusahaan migas yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya secara lengkap dan berturut-turut di BEI tahun 2018-2022.	(4)
	JUMLAH DATA SAMPEL $14 \times 5 = 70$	70

Sumber: hasil analisis peneliti

Berdasarkan kriteria diatas , proses penentuan sampel dilakukan dengan melakukan eliminasi kepada perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampel penelitian ini. Dari 18 perusahaan yang bergerak pada sektor minyak dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022 terdapat 14 perusahaan yang memehuni kriteria yaitu perusahaan yang dinyatakan melakukan penghindaran pajak dengan nilai CETR dibawah 22%. Periode penelitian yang digunakan adalah selama 5 tahun, sehingga diperoleh 70 data pengamatan yang telah memenuhi kriteria. Daftar nama perusahaan migas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	MEDC	PT Medco Energi Internasional Tbk
2	ELSA	PT Elnusa Tbk
3	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
4	ENRG	PT Energi Mega Persada Tbk
5	APEX	PT Apexindo Pratama Duta Tbk
6	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk
7	ARTI	PT Ratu Prabu Energi Tbk
8	ESSA	PT Surya Esa Perkasa Tbk

9	SURE	PT Super Energy Tbk
10	MTFN	PT Capitalinc Invesment Tbk
11	MITI	PT Mitra Investindo Tbk
12	PKPK	PT Perdana Karya Perkasa Tbk
13	RUIS	PT Radiant Utama Interinsco Tbk
14	SICO	PT Sigma Energy Compressindo Tbk

Sumber:Peneliti

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen, sering kali disebut dengan variabel bebas, yakni suatu variabel yang dapat memberikan suatu pengaruh kepada variabel dependen. Variabel bebas dapat diartikan sebagai suatu situasi, kondisi maupun nilai yang keberadaannya dapat mengubah kondisi maupun nilai dari hal lainnya. Peneliti ini meliputi enam variabel independen yaitu :

a. Tekanan (X1)

Tekanan menjadi motivasi yang mendorong dilakukannya tindakan *fraud*. Kecurangan berpotensi terjadi karena tekanan suatu kondisi yang memaksa. Tekanan tersebut meliputi adanya target yang ingin dicapai atau kondisi sulit. Menurut (Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99, 2002) menjelaskan berbagai *pressure* yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan salah satunya adalah *financial target* atau target keuangan. Target keuangan adalah target yang diharapkan suatu perusahaan. *Financial target* juga menunjukkan pencapaian perusahaan menghasilkan keuntungan, dimana upaya yang dilakukan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dapat diukur dengan ROA (*Return On Assets*)

(Fuad *et al.*, 2020). *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih.

ROA dihitung dengan:

$$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Standar yang harus dicapai untuk ROA yaitu dengan nilai 5,98%. Ini berarti jika nilai ROA berada di atas 5,98% berarti nilai ROA dapat dikatakan baik, namun apabila nilai ROA kurang dari 5,98% berarti ROA dapat dikategorikan kurang baik (Saefullah *et al.*, 2018). Sehingga ketika perusahaan memiliki ROA yang tinggi maka tekanan keuangan yang didapat perusahaan juga akan tinggi.

b. Peluang (X2)

Fraud dapat terjadi karena adanya peluang untuk melakukan *fraud* tersebut. Peluang mengacu pada kurangnya fungsi kontrol dalam organisasi sehingga para pelaku yang awalnya tidak mempunyai niat untuk melakukan *Fraud*, akhirnya bisa melakukan *Fraud*. (Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99, 2002) menjelaskan kondisi terkait opportunity (peluang) yang menyebabkan kecurangan salah satunya yaitu *ineffective monitoring* yaitu situasi tidak adanya pengawasan yang efektif dalam pengawasan baik dalam hal kinerja maupun operasional perusahaan. Rasio proporsi komisaris independen (BDOUT) dapat digunakan untuk mengukur tidak efektifnya pengawasan (Susianti & Yasa, 2015), dengan rumus:

$$BDOUT = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$

Standar dewan komisaris independen berdasarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /POJK.04/2017, 2017) menunjukkan pesentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Sehingga peluang yang tinggi disini akan dicapai ketika perusahaan memiliki dewan komisaris independen yang sedikit.

c. Rasionalisasi (X3)

Rasionalisasi merupakan salah satu bentuk pembenaran terhadap perbuatan *fraud* yang dilakukan (Indriyanto, 2022). Berdasarkan (*Statement on Auditing Standards* (SAS) No. 99, 2002) rasionalisasi pada perusahaan dapat dilakukan pengukuran menggunakan *auditor opinion* (opini audit). Opini auditor umumnya dapat digunakan dalam penilaian efektivitas kinerja sekaligus menilai apakah kondisi laporan keuangan yang disampaikan oleh manajemen telah memenuhi akuntabilitas dan transparansi (Aprilia, 2017). Opini auditor ialah opini atau suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor yang dapat menggambarkan apa yang ada atau tidak ada dalam suatu laporan keuangan yang diaudit (Nurchoirunanisa *et al.*, 2020).

Opini wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan auditor dapat dipertanggungjawabkan, ini dapat menunjukkan tidak adanya kecurangan sehingga kinerja perusahaan dinilai baik. Dengan ini, opini auditor dapat menentukan ketepatan keputusan investor dalam berinvestasi. Apabila opini

yang dikeluarkan auditor untuk perusahaan baik, maka menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut berkualitas dan kemungkinan terjadinya fraud sangatlah kecil.

Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelasan yakni opini yang dikeluarkan oleh auditor karena auditor merasa perlu atau wajib memberikan suatu keterangan maupun informasi tambahan. Adapun kondisi yang melatarbelakangi auditor memberikan opini ini adalah Karena beberapa kondisi yaitu *trend negative*, tanda-tanda yang ditemukan auditor yang menunjukkan potensi terjadinya krisis keuangan, masalah intern, dan masalah luar biasa yang telah terjadi ((IAPI), 2011). Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas membuat pihak manajemen membenarkan atau merasionalkan *fraud* yang telah dilakukan (Annisya *et al.*, 2016). Sehingga tingkat rasionalisasi yang tinggi akan dimiliki oleh perusahaan dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraph penjelas.

Oleh karena itu dalam elemen rasionalisasi pada fraud hexagon peneliti menggunakan opini audit (*auditor opinion*). Opini auditor dalam penelitian ini diukur menggunakan *variabel dummy*. Yaitu dengan memberi 1 (satu) apabila opini audit perusahaan wajar tanpa pengecualian sedangkan 0 apabila opini audit yang didapatkan perusahaan adalah wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas.

d. Kompetensi (X4)

Kompetensi dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan dari pelaku kecurangan sehingga berhasil mencari celah yang terdapat pada pengendalian internal perusahaan, mengembangkan strategi penggelapan dengan sedemikian rupa serta dapat mengendalikan kondisi sosial sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk berkerja sama dengannya dan mendapatkan suatu keuntungan (Marks, 2012). Tindakan *fraud* memerlukan kemampuan untuk mewujudkannya. Kemampuan ini dapat diukur menggunakan perubahan direksi. Menurut (Siddiq *et al.*, 2016) pergantian direksi merupakan proksi dalam kemampuan yang mendorong terjadinya *fraud. Stress period* yang disebabkan oleh pergantian direksi akan meningkatkan peluang terjadinya penipuan. Pergantian direksi akan ada tahap penyesuaian dalam peralihan direksi lama ke direksi baru, dan pada masa inilah akan rentan kecurangan.

Pergantian direksi sebagai salah satu pemilik jabatan tertinggi pada perusahaan dapat mengindikasikan adanya tindak penyelewengan. Hal ini dikarenakan posisi dan jabatannya yang dapat memengaruhi kinerja manajemen perusahaan. Berdasarkan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014, 2014) masa jabatan anggota Direksi dalam 1 (satu) periode paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud. Sehingga ketika pergantian direksi ini tinggi maka kompetensi yang dimiliki perusahaan dalam melakukan fraud juga tinggi.

Pengukuran perubahan direksi pada penelitian ini menggunakan variabel dummy. Yakni dengan memberi 1 apabila opini audit perusahaan ialah wajar tanpa pengecualian. Namun, apabila opini audit yang didapatkan perusahaan adalah wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas, maka akan mendapatkan nilai 0.

e. Arogansi (X5)

Menurut (Crowe, 2011), arogansi adalah sikap bahwa seseorang lebih unggul dari orang lain dan beropini bahwa hak-haknya tidak terpengaruh, dan bahwa seseorang dikecualikan dari pengendalian internal dan peraturan perusahaan. *Fraud* bisa terjadi karena kesombongan. Motivasi arogansi menjelaskan kecurangan yang dilakukan karena keserakahan dan kesombongan sehingga menghindari sistem pengendalian internal. Arogansi dapat diukur dengan narsisme direktur utama. Jumlah foto CEO dapat mengindikasikan tingkat narsistik seseorang atas jabatan dan posisinya yang tinggi dan semua pihak harus mengetahuinya. Sehingga ketika CEO sering menampilkan fotonya maka akan menunjukkan ia semakin arogan. (Kusiyah *et al.*, 2022) menjelaskan penilaian dalam jumlah foto CEO ini dengan memberikan skor sesuai kriteria sebagai berikut :

Skor 1 = Foto CEO tidak ada

Skor 2 = Foto CEO dengan 1 atau lebih rekan eksekutif lain

Skor 3 = Foto sendiri CEO dengan ukuran kurang dari setengah halaman

Skor 4 = Foto sendiri CEO dengan ukuran lebih dari setengah halaman

f. Kolusi (X6)

Kolusi adalah suatu sikap maupun tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran yang dapat dilakukan individu dengan individu lainnya dalam proses pembuatan suatu perjanjian maupun kesepakatan tertentu. Praktik kolusi dalam suatu perusahaan dapat tercerminkan melalui koneksi pejabat perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan (Shleifier & Vishny, 1994). Kolusi ini dapat diukur dengan koneksi politik. Koneksi politik antara pihak perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan misalnya kemudahan dan perolehan hak-hak istimewa.

Koneksi politik diukur dengan memanfaatkan variabel dummy (Kusumosari, 2020). Yaitu dengan memberikan kode 1 untuk perusahaan yang memiliki koneksi politik, yaitu apabila salah satu dari direktur atau komisaris menjadi anggota maupun mantan anggota dari DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintahan termasuk militer, atau anggota partai politik. Serta kode 0 diberikan pada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

3.3.2 Variabel Dependen (Terikat)

Menurut (Sugiyono, 2016) variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel independen (bebas) ialah variabel dependen (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan menggunakan CETR sebagai alat ukurnya. Pengukuran *CETR* menurut (Ritonga, 2019) dinilai baik dan tepat karena dapat memberikan deskripsi mengenai adanya kegiatan *tax avoidance* hal ini dikarenakan pengukuran melalui *CETR* tidak terpengaruh atas ada maupun

tidaknya perubahan estimasi misalnya adanya perlindungan pajak. CETR yang rendah menunjukkan bahwa suatu organisasi berusaha menghindari pembayaran pajak. Menurut (Suntari & Mulyani, 2020), rumus ini digunakan untuk menghitung CETR:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam perhitungan CETR perusahaan dinyatakan melakukan penghindaran pajak ini jika menunjukkan nilai CETR yang berada dibawah *statutory tax rate* atau tarif pajak penghasilan badan (Tebiono & Sukadana, 2019). Dilansir dari (stats.oecd.org, 2022) menunjukkan bahwa tarif PPh Badan tahun 2022 yaitu sebesar 22%, sehingga perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak jika nilai CETR menunjukkan angka dibawah 22%. Dengan pengukuran menggunakan CETR ini akan menunjukkan rendahnya tingkat penghindaran pajak melalui nilai CETR yang tinggi. Namun, sebaliknya apabila terjadi tingkat penghindaran pajak yang tinggi, maka nilai CETRnya akan lebih rendah (Ayu Widya Lestari & Putri, 2017).

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Data merupakan bahan mentah yang harus diolah guna memperoleh sebuah keterangan maupun informasi yang menunjukkan fakta, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Juliandi *et al.*, 2014). Ditinjau dari sumbernya, penelitian ini

menggunakan jenis data sekunder. Menurut (Chandrarin, 2017) data sekunder merupakan data yang telah dipakai atau diterbitkan oleh pihak lembaga sebelumnya.

Data sekunder pada penelitian ini adalah laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan perusahaan sektor manufaktur yang dapat diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Sumber data lain yang mendukung tujuan pada penelitian ini berupa, jurnal terdahulu, dan data sumber lain dari internet.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik dokumentasi penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dianalisis dan dievaluasi dengan analisis data sekunder laporan tahunan perusahaan migas yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) di www.idx.co.id. Perangkat lunak statistik SPSS digunakan untuk memproses dan menganalisis data ini.

2. Studi Pustaka

Peneliti juga melakukan studi pustaka melalui pencarian informasi pada internet, jurnal terdahulu, maupun buku yang sesuai dengan topik penelitian.

3.5 Metode Analisa

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2017) analisis statistik deskriptif dimanfaatkan dalam menganalisis data melalui penggambaran maupun pendeskripsian data yang dikumpulkan sebagaimana saat didapatkan dan tidak memiliki niat untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diterima secara umum dan general. Uji statistik deskriptif akan menyajikan ringkasan, pengaturan, atau penyusunan dalam bentuk nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), nilai standar deviasi (Sujarweni, 2015). Penggunaan analisis ini bermaksud agar dapat mendeskripsikan hasil uji dan analisis statistik untuk tiap variabel.

Adapun tahun 2020-2022 mulai di berlakukan tarif pajak 22% di indonesia. Tarif ini digunakan untuk mengkategorikan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Apabila nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan kurang dari 22% maka perusahaan ini dapat dikategorikan telah melakukan penghindaraan pajak. Namun, apabila nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) lebih dari sama dengan 22%, maka poerusahaan tersebut dapat di katakan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dirancang untuk menemukan hasil analisis regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi klasik dan bebas dari penyimpangan (Ghozali, 2018). Ada berbagai macam uji yang membentuk uji asumsi klasik antara lain:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud melakukan pengujian terhadap model regresi, variabel pengganggu atau residual apakah telah terdistribusi

secara normal (Ghozali, 2018). Uji *kolmogorov smirnov* peneliti gunakan untuk mengetahui apakah residu berdistribusi normal atau tidak. Keputusan pada pengujian statistic *Kolmogorov Smirnov* adalah nilai *Asyomatic Significance* yang ditunjukkan dengan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu:

- a) Jika $\text{Sig} > 0,05$ dikatakan data berdistribusi normal
- b) Jika $\text{Sig} < 0,05$ dikatakan data tidak berdistribusi normal

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bermaksud melakukan pengujian terhadap model regresi yang didapatkan apakah memiliki kolerasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018). Apabila antar variabel independen memiliki korelasi satu sama lain, maka dapat diindikasikan telah terjadi gejala multikolinieritas. Selain itu, melalui pengujian ini, maka akan menghindari adanya kecenderungan pada proses penarikan kesimpulan yang terkait dengan pengaruh parsial; pada tiap variabelnya. Ada dua langkah untuk mengetahui apakah terdapat multikolinieritas yaitu melalui pengujian nilai *tolerance value* atau nilai *variance inflation factor* (VIF). Adapun pengujian ini menggunakan kriteria sebagai berikut :

- a) Apabila nilai $\text{Tolerance} < 0.1$ dan $\text{VIF} > 10$ dikatakan terjadi multikolinieritas
- b) Apabila nilai $\text{Tolerance} > 0.1$ dan nilai $\text{VIF} < 10$ dikatakan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dalam pengujian apakah pada model regresi terjadi ditemui ketidaksamaan *variance* dan residual pada observasi satu ke observasi lainnya (Ghozali, 2018). Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan memperhatikan pola tersebarnya titik dan populasi yang ditunjukkan pada bidang regresi yang tidak stabil. Ketidak stabilan ini dipengaruhi adanya situasi yang berubah yang mana perubahan ini tidak dapat ditunjukkan pada model regresi. Heteroskedastisitas bisa dideteksi melalui ada atau tidak pola di grafik *scatterplot*:

- a) Bila terdapat pola tertentu yang terlihat secara jelas, misalnya penyebaran titik-titik yang ditunjukkan pada grafik penyebarannya teratur dan dapat menunjukkan pola tertentu misalnya bergelombang, melebar atau menyempit, maka yang membentuk pola teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
- b) Bila tidak pola terlihat tidak jelas, yakni dengan titik-titik yang penyebarannya tidak teratur dan berada diatas dan dibawah nilai nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi atau *Run Test* adalah komponen dalam statistik non-parametrik yang dimanfaatkan dalam pengujian apakah ada korelasi yang tinggi antar residual. Ini merupakan cara yang baik untuk menyadari apakah model regresi yang digunakan baik dan bebas

dari autokorelasi (Ghozali, 2018). Residual bersifat random atau acak apabila tidak ada hubungan korelasi antar residual. Berikut adalah beberapa hipotesis yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan:

1. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $< 5\%$ atau 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a yang akan diterima. Dapat diartikan bahwa data residual terjadi secara tidak acak atau sistematis.
2. Apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> 5\%$ atau 0,05 maka H_0 yang akan diterima dan H_a ditolak. Dapat diartikan bahwa data residual terjadi secara acak.

3.5.3 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

1. Uji Ketepatan Model

Uji Ketepatan/keberartian model dapat dilakukan dengan uji F dimana tujuannya untuk mengetahui kesesuaian persamaan yang selanjutnya akan digunakan dalam pengujian regresi linier berganda. Adapun kriteria yang dalam uji ini menggunakan nilai $p \leq 0,05\%$ dan level alfa 5%. Apabila hasil dalam uji ini menghasilkan nilai $p \leq 0,05\%$, maka persamaan regresi yang ditetapkan sudah tepat dan sesuai. Namun, apabila analisis ini mendapatkan nilai $p > 0,05\%$, pada level alfa 5%, maka model persamaan regresi ini tidak signifikan dan tidak tepat apabila akan digunakan dalam pengujian berikutnya (Chandrarin, 2017).

2. Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2018), analisis regresi bertujuan untuk melakukan pengukuran kekuatan hubungan antara dua atau lebih variabel dan mengukur hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis regresi linear berganda akan mengevaluasi seberapa besar pengaruh tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, arogansi, dan kolusi terhadap praktik penghindaran pajak. Untuk membuktikan hipotesis yang dikemukakan sebelumnya, maka analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Dengan keterangan :

Y : Penghindaran Pajak (CETR)

α : Nilai Konstanta

X_1 : Tekanan (ROA)

X_2 : Peluang (rasio jumlah komisaris independen)

X_3 : Rasionalisasi (opini audit)

X_4 : Kompetensi (pergantian direksi)

X_5 : Arogansi (narsisme CEO)

X_6 : Kolusi (koneksi politik)

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$: Koefisien Regresi

e : Error

3. Uji Parsial (Uji T)

Penggunaan uji t ditujukan untuk membuktikan apakah nilai rata-rata satu variabel didalam populasi sama dengan nilai tertentu yaitu taraf signifikansi 5% yang dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antar variabelnya (Sujarweni, 2015). Kriteria uji t menurut (Ghozali, 2018):

- a) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ H_0 diterima, maka tak ada pengaruh yang signifikan diantara variabel dependen dengan variabel independen
- b) Bilamana nilai signifikan $< 0,05$ H_0 ditolak, maka ada pengaruh signifikan diantara variabel dependen dengan variabel dependen

4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Menurut (Ghozali, 2018) *Adjusted R²* bertujuan menilai seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas, sementara juga mempertimbangkan variabilitas yang tidak dapat dijelaskan. Variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini juga merupakan bagian dari variasi ini. Nilai *Adjusted R²* adalah 0 sampai 1. Hasil uji koefisien determinasi ditentukan oleh nilai *Adjusted R²*. Cara melihat Uji R Square (Ghozali, 2018):

- a. Apabila nilai *Adjusted R²* mendekati 0, maka dapat dimaknai bahwa variasi variabel independen dalam menjalankan semua variasi variabel memiliki kemampuan yang terbatas.

- b. Apabila nilai koefisien mendekati 1, maka variabel independen hampir sempurna dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan prediksi terhadap variasi variabel independen.
- c. Apabila nilai *Adjusted R²* sama dengan 0, maka yang dapat digunakan ialah nilai R^2